

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Baumata Barat mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 perbedaannya hanya terletak waktu penyampaian penyempurnaan RAPBDesa kepada camat.
2. Pelaksanaan keuangan di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, baik penerimaan maupun pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Namun pelaksanaan kegiatannya masih belum sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014, karena pengajuan surat permintaan pembayaran (spp) dilakukan sebelum barang dan jasa diterima.
3. Pada tahap Penatausahaan pengelolaan keuangan Baumata Barat secara umum sudah sesuai permendagri Nomor 113 Tahun 2014 hanya terlambat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bisa dilakukan tiga bulan sekali atau bisa juga akhir bulan.
4. Pada tahap pelaporan keuangan Desa Baumata Barat secara garis besar sudah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

5. Pada tahap Pertanggungjawabannya secara umum sudah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 hanya dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat hal ini dikarenakan pemerintah desa belum memiliki media informasi untuk diakses oleh masyarakat hanya menggunakan secara tertulis yaitu seperti papan pengumuman.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Baumata Barat harus melakukan upaya pemberdayaan/ pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dalam melakukan pengelolaan keuangan desa baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban supaya sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Diharapkan agar Pemeritah Desa Baumata Barat lebih memperhatikan waktu dalam penyampaian pelaporan realisasi pertanggungjawaban dan waktu dalam penyempurnaan APBDesa agar tidak terjadi keterlamabatan.
3. Pemerintah Desa harus bisa memahami Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Dini utami,2019 Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penerbit Desa Pustaka Indonesia
- Bastian, Indra. (2015). Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Dwi Wahyuni, 2015 Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Skripsi.
- Gamaliel, Hendrik, Maumaya, J.V dan Sabijono, Harijanto. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolang Mongondow Selatan). Jurnal EMBA. Vol.5(juni).No.2:120-130
- Istijanto, M.M., M.Com. 2010 Riset Sumber Daya Manusia. Gramedia Pustaka Utama
- Kiana Purti, 2019 Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa. Penerbit Desa Pustaka Indonesia
- Lilis Ardini Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Journal Ilmu dan Riset Akuntansi
- Mewvi I. Walukow, Lintje Kalangi , Sherli Pinatik (2017) Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 Jurnal Riset Akuntansi Going Concern
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta; ANDL
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Septi Indah Dewi, 2019 Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa. Penerbit Desa Pustaka Indonesia
- Sugiyono, 2016 Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta Bandung
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015b). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumpeno, Wahjudin. (2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Acch: The World Bank.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014/ Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Widi Nurdiati,2020. Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi: universitas widyatama